

ANALISIS TINGKAT PENDIDIKAN, PDRB DAN UPAH MINIMUM REGIONAL TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN

Kuswantoro¹, Indah Giyanti Permata Dewi²

¹ Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
e-mail: torkuzz@yahoo.com

² Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
e-mail: indah.gpd@untirta.ac.id

ABSTRACT

This study is purposed to: (1) Determine the influence of education level (APS SMA) to the level of poverty in the province of Banten during 2005 to 2013, (2) Determine the influence of Gross Regional Domestic Product to poverty in Banten province during 2005 to 2013, (3) Determine the the influence of regional minimum wage to poverty in Banten province during 2005 to 2013. The method of this research uses panel data analysis by combine the time series and cross section data. The data is colected from the Central Statistics Agency (BPS) publication of Banten Province. The result of research show that the variable of education level, Gross Regional Domestic Product and Regional Minimum Wage have significant influence to poverty in the province of Banten.

Keywords: *Poverty, education level, Regional Gross Domestic Product, Regional Minimum Wage.*

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk; (1) Menentukan pengaruh tingkat pendidikan (APS SMA) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten dari tahun 2005 sampai 2013. (2) Menentukan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Banten dari tahun 2005 sampai 2013. (3) Menentukan pengaruh upah minimum regional terhadap kemiskinan di provinsi Banten. Metodologi penelitian ini menggunakan analisis panel data dengan mengkombinasikan data runtut waktu dan data cross section. Data diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto dan tingkat upah minimum regional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Banten.

Kata kunci: *Kemiskinan, tingkat pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Regional*

1 PENDAHULUAN

Kemiskinan identik dengan negara sedang berkembang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan negara sedang berkembang sulit untuk menjadi maju. Kesamaan karakteristik negara sedang berkembang pada umumnya, tingkat pendapatan nasional negara berkembang terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya pun tergolong lambat. Pendapatan perkapita negara sedang berkembang juga masih rendah dan

pertumbuhannya amat sangat lambat bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) merupakan masalah besar di banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia (Merna Kumalasari 2011).

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Menurut M. Nasir dalam Ernawati (2012) permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil pembangunan (Soegijoko, 2001).

Menurut World Bank (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, luas wilayah Provinsi Banten adalah 8.651,20 km², yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten yaitu: Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang dan 2 (dua) kota yaitu Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Seiring dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan tahun 2007-2008 telah menjadi pemekaran wilayah, dengan terbentuknya Kota Serang sebagai pemekaran dari Kabupaten Serang dan Kota Tangerang selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Tangerang, sehingga saat ini jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten menjadi 4 (empat) Kabupaten dan 4 (empat) Kota.

Masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Banten tidak jauh berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, yakni masih banyaknya penduduk miskin. Tahun 2012 persentase penduduk miskin di Provinsi Banten mengalami penurunan sebanyak 5,71 persen di bandingkan dengan tahun sebelumnya sedangkan pada tahun 2013 persentase penduduk miskin di Provinsi Banten mengalami kenaikan sebanyak 5,89 persen. Tingkat kemiskinan di Banten pada periode tahun 2007 hingga tahun 2012 mengalami kecenderungan yang menurun. Pada periode tahun 2007 hingga tahun 2012 tingkat kemiskinan turun dari sebesar 9,07 persen menjadi 5,71 pada tahun 2012, akan tetapi pada tahun 2013 tingkat kemiskinan naik menjadi 5,89 dimana tingkat kemiskinan yang paling tinggi dari tahun 2007 hingga tahun 2013 terjadi pada Kabupaten Pandeglang dibandingkan Kabupaten dan Kota lain yang ada di Provinsi Banten, hal ini disebabkan karena selama periode (Maret 2013-September 2013), pemerintah menaikkan harga BBM pada bulan Juli 2013, yang menjadi pemicu inflasi pada bulan tersebut sebesar 5,76 persen.

Rendahnya kualitas SDM menjadi sumber masalah yang dihadapi suatu daerah termasuk masalah kemiskinan. Kualitas SDM yang rendah akan menyebabkan produktifitas rendah, sehingga upah yang diterimanya juga rendah. Rendahnya kualitas SDM ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang ditempuh oleh penduduk miskin, sehingga jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

Angka Partisipasi Sekolah SMA (Usia) di Provinsi Banten tahun 2007-2013 mengalami tren yang fluktuatif. Angka partisipasi sekolah tertinggi berada pada kota Tangerang dan kota Cilegon, sedangkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA terendah berada pada Kabupaten Lebak.

Pendidikan mencerminkan tingkat kepandaian (kualitas) atau pencapaian pendidikan formal dari penduduk suatu negara. Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional) menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah angka PDRB per kapita. PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin, 2001). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu. PDRB di Provinsi Banten dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 mengalami kenaikan yaitu dari sebesar Rp 75.349,61 miliar menjadi Rp 105.856,07 miliar pada tahun 2013. Sedangkan persentase jumlah orang miskin mengalami kenaikan juga pada tahun 2012 dan 2013 yaitu dari sebesar 5,71 persen menjadi 5,89 persen. PDRB merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Banten. Namun perkembangan PDRB yang meningkat tidak selalu diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Menurut penelitian Budhi (2013:6), peningkatan PDRB merupakan syarat keharusan untuk mengurangi kemiskinan. Jika PDRB meningkat maka kemiskinan menurun.

Secara keseluruhan Upah Minimum Regional di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya karena sudah ditetapkan oleh pemerintah. Wilayah yang memiliki besaran Upah Minimum Regional yang paling tinggi di Provinsi Banten terdapat pada wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Pada setiap tahun di setiap Kabupaten dan Kota mengalami kenaikan, upah dinaikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, namun berbeda dengan wilayah lainnya, wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak hingga sampai tahun 2010 belum mencapai angka satu juta rupiah dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lainnya yang ada di Provinsi Banten yang sudah mencapai angka satu juta Rupiah.

2 TINJAUAN LITERATUR

Kemiskinan adalah fenomena yang seringkali dijumpai dalam kehidupan bersosial. kemiskinan seringkali dipandang sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Berbagai program telah dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut, tetapi secara statistik angka kemiskinan cenderung semakin tinggi seiring dengan meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat. Rendahnya tingkat kehidupan yang sering dijadikan sebagai alat ukur kemiskinan hanyalah merupakan salah satu mata rantai dalam lingkaran kemiskinan. Banyak tokoh, peneliti, badan resmi pemerintah, yang memiliki pendapat tersendiri dalam memandang masalah kemiskinan ini (Prabowo Dwi, 2014).

Seperti diketahui, terdapat banyak teori dan pendekatan dalam memahami kemiskinan. Namun jika disederhanakan, setidaknya untuk keperluan penelitian ini, maka terdapat dua paradigma atau teori besar (*grand theory*) mengenai kemiskinan: yakni paradigma neo-liberal dan sosial demokrat. Kedua paradigma tersebut pertama yang memandang kemiskinan dari kacamata struktural dan yang kedua secara individual. Pandangan ini kemudian menjadi basis dalam menganalisis kemiskinan ataupun dalam merumuskan kebijakan dan program-program yang berusaha mengatasi kemiskinan.

2.1 Teori Neo-Liberal

Shannon, Spicker, Cheyne, O'Brien dan Belgrave mengatakan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang jika pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Ini berarti strategi penanggulangan kemiskinan bersifat "residual" sementara, yang melibatkan keluarga, kelompok swadaya atau lembaga keagamaan. Negara akan turut campur ketika lembaga-lembaga di atas tidak lagi mampu menjalankan tugasnya. Penerapan Jaminan Pengaman Sosial (JPS) di Indonesia adalah contoh nyata pengaruh teori ini.

Teori neo-liberal berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh Thomas Hobbes, John Lock dan John Stuart Mill yang intinya menyerukan bahwa komponen penting dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu.

2.2 Teori Demokrasi Sosial

Teori ini memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individu, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses kelompok kepada sumber-sumber kemasyarakatan. Teori Demokrasi Sosial menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan sosial) bagi seluruh warga negara. Karena meskipun teori ini tidak anti sistem ekonomi kapitalis, namun merasa perlu ada sistem negara yang mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Teori yang berporos pada prinsip-prinsip ekonomi campuran ini muncul sebagai jawaban terhadap depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1920-an dan awal 1930-an. Sistem negara kesejahteraan yang menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan sosial, sangat dipengaruhi oleh pendekatan

"ekonomi manajemen permintaan" (*demand management economics*) gaya keynesian ini.

Menurut Jhingan (2000), mengemukakan tiga ciri utama Negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. Pertama, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki ketrampilan ataupun keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif dan yang ketiga adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman.

Maxwell (2007), menggunakan istilah kemiskinan untuk menggambarkan keterbatasan pendapatan dan konsumsi, keterbelakangan derajat dan martabat manusia, ketersingkirkan sosial, keadaan yang menderita karena sakit, kurangnya kemampuan dan ketidak berfungsian fisik untuk bekerja, kerentanan (dalam menghadapi perubahan politik dan ekonomi), tiadanya kelanjutan sumber kehidupan, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, dan adanya perampasan relative (*relative deprivation*).

Menurut Marger (2008:161) kaum miskin adalah orang-orang yang berada pada kelas hierarki bawah. Menurut Ravallion (2001) kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidak berdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.

Kemiskinan dalam arti luas dapat diartikan sebagai keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas atau bahkan sebuah Negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara (Sri Budhi, 2013).

Tingkat Pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pelajaran dan cara menyajikan bahan pelajaran. Tingkat pendidikan formal yang tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003, terdiri dari 3 jenjang yang dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Asumsi dasar Teori human capital adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilan melalui peningkatan pendidikan. Berdasarkan teori tersebut dapat dijelaskan bahwa, setiap tambahan satu tahun sekolah, itu berarti meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang, akan tetapi di pihak lain menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun untuk mengikuti sekolah tersebut dan berharap untuk meningkatkan penghasilan dengan peningkatan pendidikan (Mankiw, 2006:57)

Peranan pendidikan formal untuk meningkatkan keterampilan sudah diakui oleh semua negara. Pendidikan formal seperti dikatakan oleh (Todaro, 2010), tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pekerja untuk kepentingan pembangunan, tetapi pendidikan formal juga bisa memberikan nilai-nilai,

cita-cita, sikap dan aspirasi langsung atau tidak langsung berkaitan dengan ketimpangan pendidikan.

Pembinaan sumber daya manusia adalah usaha memperbesar kemampuan produksi seseorang, baik dalam pekerjaan atau kegiatan lain yang dapat mempermudah orang tersebut ditempatkan dalam pekerjaan. Menurutnya usaha pembinaan sumber daya manusia telah disetujui sebagai salah satu usaha penciptaan kesempatan kerja (Yos Merizal, 2008).

Pendidikan sangat berpengaruh pada tingkat kualitas sumber daya manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004).

Menurut Tarigan (2005:18), Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang dihasilkan dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah bruto adalah nilai produksi (output) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan), penyusutan, dan pajak tidak langsung netto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkannya, akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto.

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat menggunakan PDRB per kapita sehingga diketahui apakah kesejahteraan masyarakat sudah tercapai atau belum.

PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Sedangkan PDRB per kapita dapat dihitung dari PDRB harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah.

Produk domestik regional bruto merupakan penjumlahan nilai output bersih (barang dan jasa akhir) yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (Propinsi dan Kabupaten/Kota) dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Kegiatan ekonomi yang dimaksud mulai kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan sampai dengan jasa-jasa. PDRB merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah yang tercipta akibat proses produksi baik barang maupun jasa di suatu wilayah/region tertentu, biasanya setahun atau

triwulan tanpa memperhatikan asal/domisili pelaku produksinya. PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perkembangan dan struktur perekonomian disuatu wilayah (BPS, 2008).

Menurut Todaro (2000:327), tingkat upah dalam bentuk sejumlah uang dalam kenyataannya tidak pernah fleksibel dan cenderung terus-menerus turun karena lebih sering dan lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai macam kekuatan institusional seperti tekanan serikat dagang atau serikat buruh. Kemerosotan ekonomi selama dekade 1980-an yang melanda negara-negara Afrika-Amerika Latin mengakibatkan merosotnya upah dan gaji riil di segenap instansi pemerintah, namun ternyata masih banyak calon pekerja yang memburu posisi kerja di sektor formal meskipun mereka tahu gajinya semakin lama semakin tidak memadai untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Tingkat pengangguran (terutama pengangguran terselubung) sangat parah dan bertambah buruk.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Teori *Human Capital* menyatakan bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Berdasarkan teori tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap tambahan 1 tahun sekolah, itu berarti meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang, akan tetapi pihak lain menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun untuk mengikuti sekolah tersebut dan berharap untuk meningkatkan penghasilan dengan peningkatan pendidikan (Mankiw, 2006:57).

Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Jika pendidikan suatu daerah sudah baik berarti mutu sumber daya manusia di daerah tersebut juga baik.

Pendidikan memainkan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2000).

Sadono Sukirno (2004) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna untuk pembangunan ekonomi. Di satu pihak untuk memperoleh pendidikan diperlukan waktu dan uang. Pada masa selanjutnya setelah pendidikan diperoleh, masyarakat dan individu akan memperoleh manfaat. Individu yang memperoleh pendidikan tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tidak berpendidikan. Semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh.

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa (Criswardani Suryawati, 2005). Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pendapatan. Hal tersebut akan menurunkan jumlah penduduk miskin.

2.3.2 Hubungan PDRB Terhadap Kemiskinan

Kuznet (2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Menurut penelitian Hermanto S. dan Dwi W. (2008) menyatakan bahwa ketika perekonomian berkembang di suatu wilayah (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil) terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan dan memiliki distribusi pendapatan dengan baik di antara wilayah tersebut, maka akan dapat mengurangi kemiskinan.

Siregar (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*Necessary Condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*Sufficient Condition*) ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya pertumbuhan ekonomi tersebut hendaklah menebar di setiap golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin (*growth with equity*). Secara langsung hal ini berarti pertumbuhan ekonomi perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor di mana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor padat karya lainnya). Adapun secara tidak langsung hal itu berarti diperlukan kebijaksanaan pemerintah yang cukup efektif dalam mendistribusi manfaat pertumbuhan yang berasal dari sektor modern seperti sektor jasa, sektor industri, sektor keuangan dan manufaktur atau sektor ekonomi yang padat modal.

Pendapatan suatu wilayah dapat diukur dari PDRB per kapita. PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin, 2001). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah yang dapat ditunjukkan dengan tingginya tingkat konsumsi yang diukur dengan pengeluaran per kapita. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang.

Selanjutnya menurut penelitian Tisna (2008) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya jika PDRB suatu daerah meningkat, maka kemiskinan di daerah tersebut akan menurun. Hal ini disebabkan karena peningkatan PDRB berarti meningkat pula produktivitas output wilayah, sehingga menyebabkan peningkatan pendapatan para pekerja karena memiliki produktivitas yang tinggi. Memiliki pendapatan yang tinggi, maka kebutuhan para pekerja dapat terpenuhi.

2.3.3 Hubungan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999, tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikkan produktivitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.

Menurut Yudha (2013:18) tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat

penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan.

Peran pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah sangat diperlukan dalam menyikapi dampak penetapan upah minimum. Tidak bisa hanya pengusaha saja yang harus menanggung dampak penetapan upah minimum ini. Dengan pengertian dan pemahaman serta kerjasama dari semua pihak yang terkait dengan hubungan industrial ini maka dapat dicapai tujuan bersama yaitu pekerja atau buruh sejahtera, perusahaan berkembang dan lestari serta pemerintah dapat menjaga perkembangan dan peningkatan perekonomian dengan baik.

3 METODE

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel yang merupakan gabungan data silang (*cross-section*) dengan data runtun waktu (*time series*) selama kurun waktu 2005-2013. Data panel digunakan untuk mengatasi masalah keterbatasan data *cross section* dan *time series* dengan menghasilkan estimasi yang lebih efisien melalui peningkatan jumlah observasi yang berimplikasi meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*).

Berdasarkan model yang digunakan dalam penelitian ini variabel maka definisi operasional dari variabel yang digunakan adalah:

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketika seseorang atau sekelompok orang berada pada kondisi tidak mampu mencukupi kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Data kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tingkat kemiskinan (dengan indikator batas rata-rata perkapita terendah) dinyatakan dalam satuan hitung persen dengan periode pengamatan tahun 2005 sampai dengan 2013.

2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan suatu negara. Jika dunia pendidikan suatu negara rendah, maka akan menyebabkan proses pembangunan menjadi terhambat. Jenjang pendidikan yaitu tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan 2000 dinyatakan dalam satuan hitung miliar rupiah dengan periode pengamatan tahun 2005 sampai dengan 2013.

4. Upah Minimum Regional

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya. Data upah minimum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari upah minimum kabupaten dan kota dinyatakan dalam satuan hitung rupiah dengan periode pengamatan tahun 2005 sampai dengan 2013.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis OLS (*Ordinary Least Square*) dengan pengertian suatu metode ekonometrik dimana terdapat variabel independen yang merupakan variabel penjelas dan variabel dependen yaitu variabel yang dijelaskan dalam suatu persamaan linier. Dalam OLS hanya terdapat satu variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen jumlahnya bisa lebih dari satu. Jika variabel bebas yang digunakan hanya satu disebut dengan regresi linier sederhana, sedangkan jika variabel bebas yang digunakan lebih dari satu disebut sebagai regresi linier majemuk atau regresi linier berganda.

Sedangkan Model ekonometrik yang dapat ditaksir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Md = \beta_0 + \beta_1 PDBt + \beta_2 TSBt + \beta_3 INFt + D1 + \epsilon_i \quad [1]$$

Berdasarkan persamaan di atas dalam bentuk Log(Ln) akan berubah menjadi sebagai berikut:

$$LnMd = \beta_0 + \beta_1 LnPDBt + \beta_2 TSBt + \beta_3 INFt + D1 + \epsilon_i \quad [2]$$

Keterangan:

Md	=	Permintaan Uang
PDB	=	Produk Domestik Bruto
TSB	=	Tingkat Suku Bunga
INF	=	Inflasi
D	=	Dummy krisis
0	=	sebelum krisis
1	=	sesudah krisis
Ln	=	Natural Log
β_0	=	Konstanta
$\beta_1\beta_2\beta_3$	=	Koefisien Regresi
ϵ	=	Error Term (kesalahan pengganggu)
i	=	Indeks
t	=	Tahun

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil regresi, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ln M2 = & -19,91153 + 2,309607 \ln PDB + 0,009702 TSB - 0,003965 INF \\ & + 0,841166 Dummy + \varepsilon_i \end{aligned} \quad [1]$$

Berdasarkan hasil di atas diperoleh nilai C sebesar -19.91153 dan berpengaruh signifikan karena probabilitasnya sebesar 0.0054 lebih kecil dari $\alpha = 5$ persen. Artinya jika variabel permintaan uang tidak dipengaruhi oleh variabel produk domestik bruto, tingkat suku bunga dan inflasi atau bernilai nol maka besarnya rata-rata permintaan uang -19,91153. Variabel produk domestik bruto memberikan pengaruh positif, dilihat dari nilai koefisien sebesar 2,309607 dan berpengaruh signifikan karena probabilitasnya sebesar 0,0000 lebih kecil dari $\alpha = 5$ persen. Produk domestik bruto memiliki pengaruh positif terhadap permintaan uang yang artinya setiap kenaikan produk domestik bruto sebesar 1 persen akan meningkatkan permintaan uang sebesar 2,309607 persen.

Variabel tingkat suku bunga memberikan pengaruh positif, dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,009702 dan berpengaruh signifikan karena probabilitasnya sebesar 0,0234 lebih kecil dari $\alpha = 5$ persen. Tingkat suku bunga memiliki pengaruh positif terhadap permintaan uang yang artinya setiap kenaikan tingkat suku bunga sebesar 1 persen akan meningkatkan permintaan uang sebesar 0,009702 persen.

Variabel inflasi memberikan pengaruh negatif, dilihat dari nilai koefisien sebesar -0,003965 dan berpengaruh signifikan karena probabilitasnya sebesar 0,0145 lebih kecil dari $\alpha = 5$ persen. Inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap permintaan uang yang artinya setiap kenaikan inflasi sebesar 1 persen akan menurunkan permintaan uang sebesar -0,003965 persen.

Variabel dummy memberikan pengaruh positif dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,841166 dan berpengaruh signifikan karena nilai probabilitasnya sebesar 0,0000 lebih kecil dari $\alpha = 5$ persen. Variabel dummy memiliki pengaruh positif terhadap permintaan uang, yang artinya pada saat sebelum dan sesudah krisis akan meningkatkan permintaan uang sebesar 0,841166.

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan karena telah terbebas dari gejala normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis regresi sebelumnya, didapat persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ln M2 = & -19.91153 + 2.309607 \ln PDB + 0.009702 TSB \\ & - 0.003965 INF + 0.841166 Dummy + \varepsilon_i \end{aligned} \quad [4]$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa jika produk domestik bruto, tingkat suku bunga, inflasi dan variabel dummy adalah sama dengan nol, maka permintaan uang di Indonesia sebesar -19,91153 persen dengan asumsi variabel lainnya adalah tetap. Dari persamaan tersebut kemudian dapat dilihat dan bedakan bahwa terjadi perbedaan persamaan regresi sebelum krisis dan setelah krisis, yang dimana didapat persamaan regresi sebelum krisis $D = 0$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ln M2 = & -19.91153 + 2.309607 \ln PDB + 0.009702 TSB - 0.003965 INF \\ & + \varepsilon_i \end{aligned} \quad [5]$$

Sedangkan persamaan regresi setelah krisis $D = 1$ dapat dilihat sebagai berikut:

$$\ln M2 = -19.070364 + 2.309607 \ln PDB + 0.009702 TSB - 0.003965 INF \varepsilon_i \quad [6]$$

Dapat dilihat bahwa adanya perbedaan pada nilai koefisien akibat dari krisis yang terjadi, dimana pada saat setelah krisis nilai koefisien permintaan uang berubah menjadi -19,070364.

4.1.1 Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Permintaan Uang

Produk domestik bruto memberikan pengaruh positif dilihat dari nilai koefisiennya yang memiliki nilai positif sebesar 2,309607 dan berpengaruh signifikan karena nilai probabilitasnya sebesar 0,0000 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$. Jadi setiap kenaikan produk domestik bruto sebesar 1 persen akan meningkatkan permintaan uang sebesar 2,309607 persen, *ceteris paribus*.

Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis penelitian dan juga teori. Sesuai dengan teori Keynes tentang motif memegang uang yaitu pada motif transaksi dan berjaga-jaga yang ditentukan oleh tingkat pendapatan. Pada saat pendapatan tinggi lebih banyak uang yang diminta untuk motif transaksi, sehingga pada saat pendapatan naik akan menyebabkan peningkatan permintaan uang.

Dapat dilihat berdasarkan data yang ada dimana ketika PDB mengalami peningkatan dari Rp 2.178.850 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 2.314.459 miliar pada tahun 2010 dan mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 2.464.566 miliar pada tahun 2011. Kenaikan PDB pada periode tersebut diikuti dengan kenaikan permintaan uang M2 dari Rp 2.141.380 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 2.471.210 miliar pada tahun 2010 dan mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 2.877.220 miliar pada tahun 2011. Menurut hasil penelitian Ardiyadi Widyarto (2007) menunjukkan produk domestik bruto berpengaruh positif dan signifikan, dikarenakan pendapatan nasional mempengaruhi tingkat transaksi dan plus deposito berjangka dan tabungan milik masyarakat pada perbankan.

4.1.2 Pengaruh Tingkat suku bunga Terhadap Permintaan Uang

Tingkat suku bunga memberikan pengaruh positif dilihat dari nilai koefisiennya yang memiliki nilai positif sebesar 0,009702 dan berpengaruh signifikan karena nilai probabilitasnya sebesar 0,0234 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$. Jadi setiap kenaikan tingkat suku bunga sebesar 1 persen akan meningkatkan permintaan uang sebesar 0,009702 persen, *ceteris paribus*.

Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian dan juga teori, dimana sesuai dengan teori yang digunakan tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Pada saat tingkat suku bunga mengalami peningkatan, permintaan uang M2 akan mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena masyarakat lebih memilih untuk menabung demi memperoleh keuntungan.

Dapat dilihat berdasarkan data yang ada tingkat suku bunga mengalami peningkatan dari 17,38% ditahun 1997 menjadi 37,84% ditahun 1998 dan mengalami penurunan 12,39% ditahun 1999. Pada periode 1997-1999 dimana tingkat suku bunga mengalami fluktuasi, hal ini tidak diikuti oleh permintaan uang M2. Permintaan uang M2 mengalami peningkatan dari Rp 355.643 miliar pada tahun 1997 menjadi Rp 577.381 miliar pada tahun 1998 dan mengalami peningkatan kembali Rp 646.205 miliar pada tahun 1999. Pada saat krisis 1998 Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga dimaksudkan untuk menarik uang dimasyarakat dengan cara menabung, akan tetapi masyarakat lebih memilih untuk memegang uang kas daripada menyimpan uang di bank, dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan. Kenyataan ini juga tidak sesuai dengan teori yang ada.

4.1.3 Pengaruh Inflasi terhadap Permintaan Uang

Tingkat Inflasi memberikan pengaruh negatif dilihat dari nilai koefisiennya yang memiliki nilai negatif sebesar -0,003965 dan berpengaruh signifikan karena probabilitasnya sebesar 0,0145 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$. Jadi setiap kenaikan inflasi sebesar 1 persen akan menurunkan permintaan uang sebesar -0,003965 persen, *ceteris paribus*.

Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian dan teori. Dimana inflasi berpengaruh positif terhadap permintaan uang M2, artinya apabila inflasi mengalami peningkatan permintaan uang akan meningkat. Hal ini dikarenakan masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih dari sebelumnya sehingga permintaan akan uang meningkat untuk tujuan transaksi.

Dapat dilihat berdasarkan data yang ada nilai inflasi di tahun 2002 sebesar 10,03% mengalami penurunan menjadi 5,16% 2003 dan kembali meningkat menjadi 6,40% ditahun 2004. Hal ini tidak diikuti permintaan uang, dimana permintaan uang mengalami peningkatan dari Rp 883.908 miliar di tahun 2002 menjadi Rp 955.692 miliar pada tahun 2003 dan mengalami kenaikan kembali sebesar Rp 1.033.880 miliar pada tahun 2004. Periode ini bertolak belakang dengan teori, pada saat terjadinya penurunan inflasi tidak mempengaruhi permintaan uang. Penurunan inflasi pada tahun 2003 disebabkan oleh perkembangan nilai tukar yang stabil, ketersediaan bahan pokok yang cukup, kenaikan harga-harga barang yang dikendalikan pemerintah (*administered price*) yang minimal, serta hasil dukungan pemerintah dalam mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi, terutama yang bersumber dari kenaikan harga-harga komoditas internasional.

4.1.4 Pengaruh Variabel Dummy Terhadap Produk Domestik Bruto

Berdasarkan hasil estimasi regresi berganda, menunjukkan bahwa variable Dummy (krisis) berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan uang di Indonesia pada tahun 1985-2014. Pada saat krisis berbagai perubahan terjadi pada kondisi perekonomian Indonesia, Sebagaimana dampak krisis pada tahun 1998, terjadi permintaan uang yang terlalu tinggi mencapai Rp 577.381 miliar dengan pertumbuhan 62,35% pada tahun 1998 dibandingkan dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan 23,21%.

Namun dapat segera pulih dan pada tahun 1999 hingga 2001 permintaan uang dapat kembali stabil dengan pertumbuhan 11-15 persen. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat pada umumnya akan lebih banyak menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan ataupun deposito seiring dengan meningkatnya tingkat suku bunga, dimana Bank Indonesia harus menyerap kelebihan likuiditasnya di masyarakat melalui kebijakan kontraktif.

5 SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Hasil pengujian secara individu menunjukkan bahwa produk domestik bruto terhadap permintaan uang (M2) di Indonesia periode 1985-2014 berpengaruh positif dan signifikan.
2. Hasil pengujian secara individu menunjukkan bahwa tingkat suku bunga terhadap permintaan uang (M2) di Indonesia periode 1985-2014 berpengaruh positif dan signifikan.

3. c. Hasil pengujian secara individu menunjukkan bahwa inflasi terhadap permintaan uang (M2) di Indonesia periode 1985-2014 berpengaruh negatif dan signifikan.
4. Hasil pengujian secara individu menunjukkan bahwa variabel dummy terhadap permintaan uang (M2) di Indonesia periode 1985-2014 berpengaruh positif dan signifikan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka dapat diajukan beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan, saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai penentu kebijakan harus lebih berhati-hati dalam menentukan keputusan, terutama mengenai pengambilan kebijakan moneter. Hal ini menunjukkan bahwa dalam membuat kebijakan hendaknya memperhatikan kondisi perekonomian secara makro maupun mikro baik dalam internal (dalam negeri) maupun eksternal (luar negeri) agar perekonomian yang maju dapat tercapai kedepannya. Pemerintah harus aktif dalam peningkatan PDB riil yang berupa peningkatan sumber daya yaitu barang modal dan tenaga kerja. Stok barang modal, termasuk bangunan, perangkat mesin, dan pembenahan sarana infrastruktur yang harus dijalankan. Dengan demikian akan menyediakan sumber lain bagi peningkatan output. Pertumbuhan yang menjadi indikator makro diharapkan terus tumbuh dengan baik, dengan demikian akan menambah lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja dan mengurangi pengangguran.
2. Pada periode setelah krisis, kebijakan moneter yang diambil dari berbagai perubahan yang terjadi dalam perekonomian dan peralihan sistem nilai tukar mempunyai implikasi terhadap kebijakan moneter di Indonesia. Bank Indonesia harus dapat menerapkan pengendalian moneter yang efektif yang berdasarkan sasaran pengendalian inflasi yang ditetapkan, serta pertumbuhan ekonomi, suku bunga, nilai tukar, dan variabel ekonomi lainnya. Bank Indonesia melalui program moneternya harus mampu memperkirakan permintaan uang yang sesuai dengan kebutuhan riil perekonomian, dengan demikian dapat memperkirakan pertumbuhan permintaan uang yang dibutuhkan masyarakat.

6 REFERENSI

- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan, Edisi Ketiga. Cetakan Pertama*. STIE YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Website:<http://www.bpsbanten.go.id/>. Badan Pusat Statistik. 2006-2014. Banten Dalam Angka 2006-2014. Badan Pusat Statistik, Banten. 2012.
- Data dan Informasi Kemiskinan 2008-2012. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia. 2012.

- Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia Berbagai Edisi. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Cholili, F.M. 2014. *Analisis Pengaruh Pengangguran, PDRB, IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya
- Gujarati, Damodar N. 2006. *Basic Econometrics Fourth Edition*. New York: The McGraw Hill Companies Inc. 2004. *Basic Econometrics Fourth Edition*. New York: The McGraw Hill Companies Inc.
- Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti. 2008. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Online at http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/PROS_2008_MAK3.pdf.
- Jhingan, M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kembar, Made Sri Budhi. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali*. Bali: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Kristanto, Prabowo D. 2014. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di kabupaten Brebes tahun 1997-2012*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Kristina Pestaria Sinaga, Tulus, Open Darnius. 2013. *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Sumatra Utara Tahun 2010-2011*. Universitas Sumatra Utara.
- Kuncoro, Mudrajat. 2007. *Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Edisi Keempat. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Airlangga. 2006. *Pengantar Ekonomi Mikro*, Edisi Ketiga, Penerjemah: Chriswan Sungkono. Jakarta: Erlangga.
- Merizal, Yos. 2008. *Analisis Pengaruh pendidikan, Tingkat Upah Minimum Kabupaten, dan Kesempatan Kerja Rehadap Pengangguran Terdidik di Kabupaten Semarang*. Semarang. UNDIP Press.
- Merna. Kumalasari. 2011. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata rata lama sekolah, Pengeluaran Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah*. Skripsi Ekonomi Pembangunan Fakultas ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Nanga, M. 2006. *Dampak Transfer Fiskal terhadap Kemiskinan di Indonesia: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan*. Disertasi Doktor Tidak Dipublikasikan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Ni Made Myanti Astrini A dan Ida Bagus Putu Purbhadharmaja. 2013. *Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengngguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali*.

- Permana, A.Y. dan Arianti, F. 2012. *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004-2009*. Diponegoro Journal of Economics, Vol. 1, (No.3): 1-8.
- Prastyo, Agus Adit. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)*.
- Ravallion, M. 2001. *Poverty Comparisons*. World Bank.
- Sasana, Hadi, 2006. *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*.
[http://eprints.undip.ac.id/16947/1/Analisis_Dampak_Desentralisasi_Fiskal_by_Hadi_Sasana_\(OK\).pdf/](http://eprints.undip.ac.id/16947/1/Analisis_Dampak_Desentralisasi_Fiskal_by_Hadi_Sasana_(OK).pdf/)
- Septyana, I.A dan Yuliarmi, Ni Nyoman. 2013. *Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Bali*. Bali: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Saputra, W.A. 2011. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pdrb, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Siregar, H. dan Wahyuniarti, D. 2008. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Tersedia: <http://deptan.go.id>. Sukirno, Sadono. 2004. *Teori Pengantar Makroekonomi*. Penerbit PT
- Rajagrafindo Persada. 2008. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta. P.T Raja Grafindo Persada.
- Sulistiawati, Rini. 2012. *Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia*. Pontianak: Univeritas Tanjungpura Pontianak.
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Penerbit Graha Ilmu, Jember.
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tarigan, Robinson, M.R.P. 2005. *Ekonomi Regional*. Edisi Revisi. Penerbit PT. Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh. Terjemahan Haris Munandar. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michael. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Bumi Aksara, Jilid 1 Edisi 9, Jakarta.
- Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, Edisi Ketiga*. EKONISIA. Yogyakarta.
- Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Wiguna, V.I. 2013. *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010*. Malang: Universitas Brawijaya Wikipedia. 2013. Welfare economics [Online].

Wijayanto, Ravi Dwi. 2009. *Analisis Pengaruh Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008*.

Yudha, Okta Ryan Pranata. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011*.